

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA
SEI SIMPANG DUA KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
KABUPATEN KAMPAR**



Oleh:

**SEPTIA ALDINA PUTRI
175310105**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA SEI SIMPANG DUA KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

**SEPTIA ALDINA PUTRI
175310105**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan Pemerintahan Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Desa Sei Simpang Dua dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Jenis penelitian ini menggunakan data yang berupa data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang didapat serta diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen yang dimana berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Data sekunder adalah data yang didapat dari literatur-literatur yang saling berhubungan. Teknik pengumpulan data yang peneliti paparkan berupa hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian pada Desa Sei Simpang Dua menunjukkan bahwa Desa tidak melaksanakan buku besar dan neraca saldo. Desa juga tidak melakukan penyusutan pada aset tetap serta dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, Desa tidak melakukan perhitungan pada akumulasi penyusutan aset tetap. Penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Sei Simpang Dua belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. (PABU).

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Prinsip Akuntansi Berterima Umum

ABSTRACT

This research was carried out in the environment of the Village Government of Sei Simpang Dua, Kampar Kiri Hilir District, Kampar Regency. The purpose of this study aims to determine the suitability of the accounting application in Sei Simpang Dua Village with the Generalized Accounting Principles (PABU).

This type of research uses data in the form of primary data and uses secondary data. Primary data is defined as data obtained and obtained from interviews and documents which are related to village financial management. Secondary data is data obtained from related literatures. The data collection techniques that the researchers describe are the results of interviews and documentation. The data analysis technique in this study used a descriptive method

The results obtained from research at Sei Simpang Dua Village indicate that the village does not implement ledgers and trial balances. The village also does not depreciate fixed assets and in the Village Owned Wealth Report, the Village does not calculate the accumulated depreciation of fixed assets. The application of accounting in the Village Government of Sei Simpang Dua is not yet in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles. (GAAP)

Keywords: Village Financial Management, Generally Accepted Accounting Principle

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah di berikan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam skripsi ini saya akan membahas **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA SEI SIMPANG KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR”**. Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu persyaratan agar memperoleh gelar sarjana ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak support, dorongan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska SE, M.Si., Ak., CA sebagai ketua Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Ibu Efi Susanti, SE., M.Acc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan, serta seluruh Staff, Karyawan/Pegawai Tata Usaha yang telah membantu meringankan keperluan yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Rio Ari Kusuma, SH selaku kepala desa dan Ibu Badriyah, S.Pd selaku Kepala Urusan Keuangan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
7. Ayah Bakri dan Ibu Azizah yang selalu memberikan motivasi dan pengorbanan serta selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Peli Padri, Wahyu Rahmadhani, Gibran dan seluruh keluarga yang memberikan semangat kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Vinia, Jafar, Aulia, Vidya, Amelia, Ipo, Miranda, Dedek, Resty, Fitri, Inggit, Intan, Nur, Desy, Mbak isil, Noviani, Tipa, Mella, Melda, Mellani, Sania, Bella. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 28 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka.....	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	11
2.1.2 Dasar Pencatatan	12
2.1.3 Prinsip Akuntansi.....	13
2.1.4 Pemakai Informasi Akuntansi.....	15
2.1.5 Tahap-Tahap Dasar Siklus Akuntansi.....	17
2.1.6 Pengertian Desa.....	23
2.1.7 Pemerintah Desa.....	24
2.1.8 Akuntansi Pemerintahan Desa.....	25
2.1.9 Tahapan Siklus Akuntansi Desa.....	26
2.1.10 Pengelolaan Keuangan Desa.....	28
2.2 Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Objek Penelitian	36
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	36
3.2.1 Data Primer.....	36
3.2.2 Data Sekunder.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1 Sejarah Desa Sei Simpang Dua.....	39
4.1.2 Visi dan Misi Desa Sei Simpang Dua.....	41
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Simpang Dua	43
4.1.4 Geografis Desa Sei Simpang Dua	44
4.1.5 Demografis Desa Sei Simpang Dua	44
4.1.5 Ekonomi Desa Sei Simpang Dua	45
4.1.6 Pendidikan Desa Sei Simpang Dua	46
4.1.7 Agama Desa Sei Simpang Dua	47
4.2 Hasil Penelitian dan Hasil Pembahasan	49

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi	49
4.2.2 Proses Akuntansi.....	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Simpulan	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kamar Kiri Hilir
- Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kamar Kiri Hilir
- Tabel 4.3 Klasifikasi Sarana Pendidikan Desa Sei Simpang Dua
- Tabel 4.4 Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kamar Kiri Hilir
- Tabel 4.5 Klasifikasi Pendidikan Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kamar Kiri Hilir
- Tabel 4.6 Klasifikasi Sarana Ibadah Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kamar Kiri Hilir
- Tabel 4.7 Buku Kas Umum – Tunai Pemerintahan Desa Sei Simpang Dua Tahun Anggaran 2019
- Tabel 4.8 Buku Bank Desa Desa Sei Simpang Dua 2019
- Tabel 4.9 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sei Simpang Dua 2019
- Tabel 4.10 Buku Besar
- Tabel 4.11 Buku Besar Pendapatan
- Tabel 4.12 Buku Besar Belanja Pegawai
- Tabel 4.13 Neraca Saldo Tahun Anggaran 2019
- Tabel 4.14 Aset Tetap
- Tabel 4.15 Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Sei Simpang Dua
- Tabel 4.16 Laporan Kekayaan Milik Desa Sei Simpang Dua Sampai Dengan 31 Desember 2019

DAFTAR GAMBAR

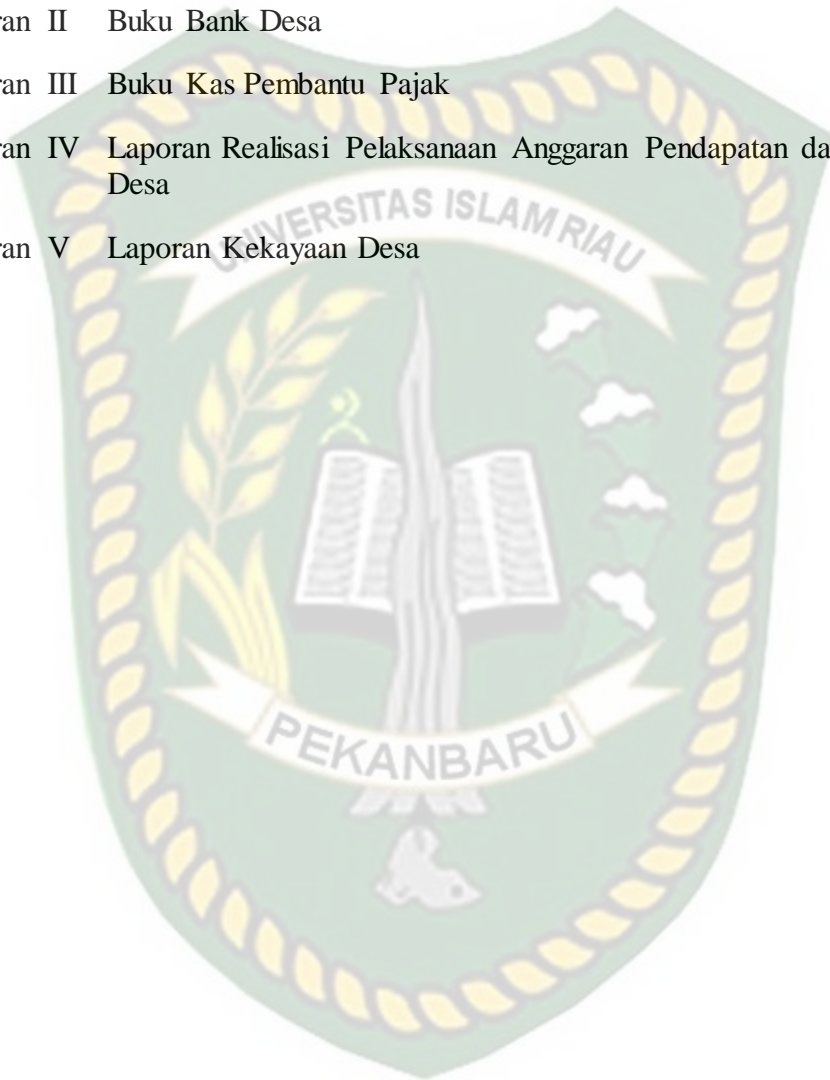
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Simpang Dua



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Buku Kas Umum
- Lampiran II Buku Bank Desa
- Lampiran III Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran IV Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran V Laporan Kekayaan Desa



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah tatanan kehidupan berupa adanya masyarakat hidup yang mendiami suatu wilayah yang dibatas dengan adanya hukum yang berlaku di dalam Pemerintahan Desa yang dimana berfungsi menata dan memberdayakan kepentingan masyarakat diwilayah pada wilayah desa tersebut. Masyarakat harus diakui secara Negara dan dihormati dalam tatanan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa sebagaimana bertugas sebagai pelaksana, dan dibantu kepala desa yang dibawah oleh perangkat desa yang bertugas melakukan pengelolaan administrasi dalam pemerintahan desa termasuk administrasi keuangan, sumber pendapatan, pengeluaran dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatatan belanja desa dan melaksanakan monitoring dan melakukan evaluasi program serta melaksanakan penyusunan laporan. Pemerintahan Desa sebagaimana pihak yang mengelola keuangan desa haruslah memahami dan mengerti mengenai akuntansi pemerintahan desa supaya pengelolaan dana desa dapat sesuai dengan yang dianggarkan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan akuntansi desa sehingga terciptanya dana desa yang transparan dan terarah.

Akuntansi merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan berupa mencatat, mengklasifikasikan, memperingkas, mengelola dan memberikan data transaksi, yang dimana saling berhubungan dengan keuangan dan digunakan oleh pihak yang membutuhkan atau pengambilan sebuah keputusan.

Tujuan akuntansi berupa mengumpulkan serta melaporkan informasi-informasi mengenai masalah keuangan, kinerja atau posisi keuangan. Informasi yang didapatkan dipergunakan sebagai dasar sebuah landasan dalam membuat suatu keputusan. Informasi yang terkait didalam akuntansi berisi informasi yang mengenai keuangan baik yang dimana berkaitan dengan harta maupun hutang desa, informasi keuangan desa nantinya dapat membantu dalam pembuatan estimasi besarnya keuntungan yang diterima oleh sebuah desa.

Dalam hal keuangan desa, adanya terjadi resiko kesalahan yang akan terjadi baik bersifat administratif ataupun substantif yang berakibat pada masalah hukum. Oleh karena itu akuntansi keuangan desa sangat berguna dalam menunjang pemerintahan desa agar bisa menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik serta sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerintah telah mengatur pengelolaan keuangan desa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari subsistem serta sistem keuangan Negara dalam memberikan dana agar terlaksananya penyelenggaraan secara baik dan

memberikan pengarahan kepada masyarakat sehingga bisa melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 telah mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa di dalamnya terselenggaranya keseluruhan aktivitas desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan serta adanya pertanggungjawaban dari keuangan desa yang dipergunakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif sehingga terciptanya kerja sama yang tertib dan disiplin.

Akuntansi keuangan desa adalah sebuah proses pencatatan transaksi pendapatan desa maupun belanja desa yang disertai adanya bukti-bukti lalu dilakukan penggolongan, pencatatan serta pelaporan keuangan desa yang dimana dapat menghasilkan suatu data yang terbentuk dalam laporan keuangan yang akan saling berhubungan kepada dana desa.

Hasil akhir dari proses pencatatan yang dilakukan oleh desa berupa laporan keuangan desa yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian program kerja yang telah dianggarkan. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan desa tersebut adalah menyajikan suatu laporan dan posisi keuangan dalam organisasi yang dimana bermanfaat sebagai pengambilan sebuah keputusan dan adanya pertanggungjawaban dengan sebuah lembaga yang telah menjadi pengguna dan pengelolaan sumberdaya pada setiap periode tertentu.

Menurut Sujarweni (2015) adanya 4 tahap dalam sebuah laporan keuangan desa yang harus diperhatikan adalah: pertama adalah mempersiapkan rencana yang berdasarkan kepada Visi dan Misi desa yang berlaku untuk penyusunan anggaran. Kedua adalah setiap anggaran yang telah dibuat adanya 3 akun yaitu akun pendapatan, akun belanja dan akun pembiayaan, dan apabila sudah memiliki 3 akun tersebut maka harus segera dilaksanakan. Ketiga adalah terjadinya transaksi yang berupa adanya pencatatan data-data pembuatan buku yang terdiri dari 5 buku yaitu: buku kas, buku kas pembantu pajak, buku bank, buku pajak, buku inventaris dan di buktikan dengan bukti transaksi yang dilakukan. Keempat adalah mendapatkan informasi yang berisi posisi keuangan dan didasarkan dengan transaksi yang telah terjadi sehingga menghasilkan sebuah neraca. Neraca yang dihasilkan dapat berfungsi mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa. Kelima adalah setelah mengetahui kekayaan atau posisi keuangan dalam sebuah neraca maka didapatkannya sebuah pertanggungjawaban seberapa banyak anggaran yang penggunaan pembuatan laporan realisasi anggaran desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Annisa Wira Pratiwi (2020) yang berjudul “Analisis Penarapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan” yang menyimpulkan bahwa hasil berupa proses pencatatan laporan keuangan pada Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2018 telah dilaksanakan, akan tetapi belum berjalan dengan sangat baik. Desa Sotol ini juga tidak menghitung saldo persediaan

yang masih tersisa diakhir periode dan juga tidak menyajikan harga perolehan tahun sebelumnya. Sehingga belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.

Penelitian berupa Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa ini juga pernah dilakukan oleh Ijul Ardianti pada Tahun (2019) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan” Hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil berupa akuntansi keuangan pada Desa Ukui II Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan masih belum sesuai terhadap prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Desa Sei Simpang Dua salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Desa Sei Simpang Dua yang dimana melaksanakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk memudahkan melakukan pengolahan keuangan desa melalui tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan serta pelaporan/pertanggungjawaban. Desa Sei Simpang Dua baru menggunakan sistem ini pada tahun 2018. Dalam penggunaan aplikasi terdapat kendala dalam sumber daya manusia serta akses internet yang belum memadai sehingga penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum efektif.

Dasar pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Desa Sei Simpang Dua adalah basis kas (*Cash Basic*) yaitu transaksi dicatat serta di terima pada saat penerimaan kas atau pada saat pengeluaran kas terjadi, pendapatan disahkan ketika

kas sudah diterima sedangkan biaya/beban akan diterima ketika kas sudah diterima dan pada saat kas sudah dikeluarkan dalam hal membayar biaya/beban tersebut.

Proses akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan desa Sei Simpang Dua dimulai dari transaksi yang terjadi didesa, disertai dengan nota-nota yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran, pendapatan atau pembiayaan. Dari bukti tersebut dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan pada buku kas umum (Lampiran 1) berfungsi untuk melakukan pencatatan semua transaksi baik dalam hal penerimaan serta pengeluaran yang secara tunai atau giral.

Selanjutnya membuat buku pembantu yang terdiri dari Buku Bank Desa (Lampiran 2) yang dipergunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang bersangkutan dengan bank. Selanjutnya adanya Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 3) berfungsi dalam hal membantu kas umum melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran pajak yang berasal dari pemungutan pajak.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Desa Sei Simpang Dua adalah membuat laporan keuangan yang berupa: 1. Membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 4). Membahas tentang banyaknya anggaran realisasi pendapatan kerja dimana pembiayaan berasal dari pemerintah untuk dalam hal tertentu 2. Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 5). Membahas

tentang aset lancar serta aset yang tidak lancar dan kekayaan bersih pemerintah pertahun tertentu.

Dalam proses akuntansi Desa Sei Simpang Dua, ditemukan bahwa desa tersebut tidak membuat buku besar serta neraca saldo didalam laporan keuangannya. Selain itu pada tahun 2018 terlaksananya anggaran pendapatan belanja desa (lampiran 4) terdapat belanja desa seperti belanja alat tulis kantor sebesar Rp2.240.100,00, belanja alat kebersihan serta bahan pembersih sebesar Rp495.200,00, belanja benda pos dan materai sebesar Rp480.000,00, serta belanja fotocopy, cetak, dan pengadaan sebesar Rp1.183.600,00, kemudian pada tahun 2019 belanja barang yang terdiri dari peralatan kantor dan benda pos, alat-alat listrik, barang cetak serta pengadaan, bahan material serta pupuk atau obat-obatan pertanian sebesar Rp5.617.000,00. Tetapi didalam Laporan Kekayaan Milik Desa tidak dicatat persediaan tersebut sehingga persediaan bersaldo Rp0 (lampiran 5).

Selanjutnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa pada bagian aset dimiliki berupa terdiri dari tanah, mesin, bangunan, gedung, jalan, jaringan dan instalasi. Aset yang berikut nya adalah aset tetap lainnya berupa kontruksi dalam pengerjaan. Pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap bersaldo Rp0 (lampiran 5), karena desa tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap yang dimiliki pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terdapat aset tetap sebesar Rp851.745.850,00 sebagai tambahan aset tetap untuk tahun 2019 akan tetapi desa tidak melakukan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah peneliti sampaikan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi Desa pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini menemukan berupa adanya masalah yang dikemukakan untuk melihat kesesuaian Akuntansi desa yang diterapkan di Desa Sei Simpang Dua dengan Prinsip Akuntansi Beterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Sebagai penjabaran ilmu dalam memahami maksud dari analisis keuangan.

- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Sei Simpang Dua.

2. Manfaat Secara praktis

- a. Untuk peneliti sendiri menjadi cakrawala berfikir dalam penerapan prinsip desa serta sebagai kewajiban persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- b. Untuk Perangkat Desa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu akuntansi keuangan di Desa Sei Simpang Dua.
- c. Bagi Penelitian berikutnya sebagai bahan pertimbangan agar penelitian yang sama dapat dijadikan bahan perbandingan, sehingga penelitian ini dapat disempurnakan kembali baik dari segi materi atau dan metode yang digunakan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang telah dipaparkan pada BAB I berupa latar belakang masalah, tujuan, manfaat dan sistematika dalam penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Telaah Pustaka dan hipotesis yang peneliti paparkan pada BAB II menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang Peneliti paparkan pada BAB III menjelaskan mengenai metode serta objek yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil serta pembahasan dari penelitian berisikan tentang gambaran umum dan hasil penelitian serta pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran yang peneliti paparkan sehingga menemukannya hasil berupa simpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi Kantor Desa Sei Simpang Dua mengenai Keuangan Desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi sangat berperan penting dalam suatu entitas akuntansi yang dimana dapat menghasilkan sebuah informasi yang menggambarkan suatu sistem kerja keuangan. Secara umum akuntansi adalah sebagai salah satu laporan kepada pemangku kepentingan dengan kegiatan ekonomi yang berlangsung dan kondisi suatu perusahaan.

Menurut Warren (2017:3) pengertian akuntansi yaitu:

Akuntansi adalah data untuk memberikan informasi berupa laporan yang diberikan kepada pemilik atau pemangku kepentingan dalam aktivitas laporan Bahasa Bisnis (*Language of Bussines*) atau dapat disampaikan bahwa informasi yang diberikan kepada pemilik kepentingan

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:

“Akuntansi memiliki pengertian sebagai informasi yang berupa mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklarifikasi, pengtaksiran transaksi, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.”

Menurut Walter (2012:3) dalam bukunya yang berjudul akuntansi keuangan:

Akuntansi adalah informasi, yang didapat serta digunakan untuk mengukur aktivitas dalam bisnis dan memproses menjadi sebuah data, dan laporan yang dapat dikomunikasikan kembali hasil yang sah kepada pimpinan keputusan dan hasil keputusan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.

Sedangkan menurut pendapat dari Sinaga (2016:15) pengertian akuntansi dapat dilihat dari Dua segi yaitu:

1. Bidang Akuntansi

Akuntansi adalah dimana berfungsi dan memberikan hasil data keuangan dari unit-unit usaha kepada pengambilan keputusan yang berkepentingan didalamnya untuk dijadikan dasar pengambilan sebuah keputusan.

2. Proses / Kegiatannya

Dipandang dari sudut kegiatannya yaitu berupa proses, penentuan, pengukuran, pencatatan, serta penyampaian informasi ekonomi pelaporan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengikhtisiran transaksi serta penghasil sebuah informasi keuangan dari sub unit usaha yang dijadikan dasar dalam pengambilan sebuah keputusan.

2.1.2 Dasar Pencatatan

Dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2021:54) memiliki dasar pencatatan terbagi empat yaitu:

- a. Basis Kas (*Cash Basis*): *Cash Basic* adalah kegiatan pencatatan data transaksi dilakukan ketika transaksi menimbulkan suatu perubahan data pada kas. Jika transaksi tidak menimbulkan atau memberikan efek yang terjadi pada transaksi, maka transaksi tersebut tidak tercatat.
- b. Basis Akrual (*Accrual Basis*) merupakan pengakuan suatu peristiwa pada saat terjadinya transaksi(dan bukan hanya belangsung pada saat kas diterima atau dibayar).
- c. Basis Kas Modifikasian: Basis Kas Modifikasian merupakan gabungan Basis Kas dan Basis Akrual.
- d. Basis Akrual Modifikasian(*Modified Accrual Basic*): *Modified Accrual Basic* menggunakan *Cash Basic* untuk transaksi tertentu dan untuk sebagian besar transaksi menggunakan *Accrual Basic*.

2.1.3 Prinsip Akuntansi

Menurut IAI-KASP (2015:7) dalam Prinsip akuntansi memegang nilai-nilai yang dimana dijadikan panutan untuk membuat standar dalam Akuntansi. Namun yang terjadi pada dasarnya prinsip dan nilai-nilai didalam Akuntansi menjadi parameter wajib dikarenakan pada dasarnya memberikan pengawasan serta memberikan tanda-tanda dengan berbagai bentuk yang sama sangat jelas dan sudah diakui kebenarannya. Mematuhi prinsip dan nilai yang berlaku dalam akuntansi seperti membuat sistem laporan keuangan dari pihak yang membuat dan pihak yang

berasal dari luar untuk membaca serta memberikan perbandingan antara laporan keuangan Pemerintah Desa yang lainnya. Prinsip dalam Akuntansi dapat digunakan berupa:

a) Prinsip Harga Perolehan

Prinsip adalah harga yang dimiliki dimana harga diperoleh dari harta atau aset. Kewajiban dari utang piutang, data pendapatan dihitung mulai dari harga perolehan yang sudah ditentukan dengan kesepakatan dari yang bersangkutan dengan pihak yang lainnya dari pihak yang telah melakukan transaksi. Harga perolehan yang dinilai objektif sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan dan pembayaran dilakukan melalui kas/bank.

b) Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip realisasi pendapatan adalah bagaimana cara untuk mengukur serta menilai dari sebuah pendapatan yang didapat. Pengukuran dilakukan dengan cara menambah harta atau aset dan berkurangnya utang atau masuknya sejumlah data pada kas. Transaksi pencatatan pendapatan terjadi pada hakikatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan transaksi berlangsung dapat dilakukan dengan jumlah kas yang diterima.

c) Prinsip Objektif

Prinsip objektif tertuju kepada laporan keuangan berdasarkan pada adanya tanda transaksi tersebut. Apabila tidak terjadi bukti maka tidak ada transaksi yang berlangsung tidak masuk dalam pencatatan. Dalam melakukan prinsip objektif diperlukannya pengawasan dan pengendalian dari dalam internal agar terhindar dari kecurangan dan manipulasi data transaksi serta pencatatan.

d) Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam melakukan data laporan harusnya mempergunakan data-data lengkap dan informasi yang tersaji dengan baik dan benar baik secara kualitatif dan kuantitatif serta dapat mempengaruhi untuk pengambilan sebuah keputusan.

e) Prinsip Konsistensi

Dalam prinsip konsistensi data dalam keuangan harus memiliki nilai yang konsisten untuk mengoperasikan seperti teknik yang diberikan, tata cara

serta standar pembuatannya. Data keuangan sendiri memiliki nilai yang berbanding, yang dimana data yang didapat dibandingkan kepada Pemerintah Desa yang dimana masa periode yang sama dan sebaliknya.

2.1.4 Pemakai Informasi Akuntansi

Dalam buku Sinaga (2016:16) informasi akuntansi dibagi menjadi dua yaitu antara pihak internal dan pihak eksternal

1. Pihak Internal

Pihak internal dalam sebuah manajemen perusahaan, data atau informasi keuangan sangat diperlukan oleh manajemen perusahaan dan mengetahui proses perkembangannya dikelolanya. Data laporan keuangan akan digunakan sebagai dasar penganggaran dan perumusan kebijakan. Karyawan memberikan informasi data keuangan sebagai dasar pengetahuan kemampuan sebuah perusahaan dalam memberikan gaji, fasilitas, bonus, menilai prospek dasar perusahaan sehingga dapat dijadikan patokan untuk memutuskan apakah bersama perusahaan atau berpindah perusahaan yang lainnya. Memberikan banyak hadiah kepada para pegawai perusahaan agar dapat menjadi nilai tambah untuk perusahaan serta menambah prospek untuk nilai perusahaan apakah tetap bersama perusahaan atau pemberhentian kerja.

2. Pihak Eksternal

a. Pemilik Perusahaan

Informasi data laporan keuangan yang dipergunakan sebagai landasan agar mengetahui bagaimana keuangan pada sebuah perusahaan harus memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan sebuah perusahaan.

b. Bank atau Kreditor

Informasi data yang digunakan sebagai dasar oleh kreditor melakukan penilaian pada perusahaan yang dimana telah melakukan pinjaman dana modal dan informasi data keuangan yang digunakan sebagai dasar menentukan kemampuan debitur agar mengembalikan dana kewajiban atau hutang piutang.

c. Investor

Informasi dana keuangan untuk dasar melakukan investasi, bagaimana modal yang ditanamkan pada sebuah perusahaan untuk melihat adanya keuntungan atau tidak terjadinya keuntungan.

d. Pemerintah

Informasi yang didapatkan dipergunakan untuk dasar keuangan yang dimana menentukan besar/kecilnya pajak yang dilunasi atau dibayar oleh sebuah perusahaan agar dapat diketahui seberapa

mampu perusahaan untuk memberikan UMR pegawai dan memberikan fasilitas kepada pegawai yang sesuai dengan syarat yang berlaku dalam perusahaan.

2.1.5 Tahap-Tahap Dasar Siklus Akuntansi

Tahap dasar untuk siklus Akuntansi adalah bagaimana sebuah proses didalam Akuntansi dimulai dengan cara menganalisa dan melakukan transaksi yang diakhiri dengan mengiktisarkan dan juga melaporkan transaksi tersebut.

Pengertian siklus akuntansi menurut Sinaga (2016:19) sebagai berikut:

“Siklus adalah sebuah cara atau proses pengelolaan data yang terdiri dari beberapa data transaksi yang berdasarkan adanya bukti telah transaksi, dan mendapatkan data-data pada sebuah laporan keuangan.”

Urutan siklus akuntansi terdiri dari:

a. Transaksi/bukti

Menurut Sinaga (2016:39) Bahwa transaksi adalah segala kegiatan perusahaan yang memberikan efek perubahan terhadap posisi keuangan dan berupa harta kekayaan yang dimiliki perusahaan.

Menurut Mardi (2014:13) mendefinisikan transaksi

Transaksi adalah sebuah kejadian yang dimana berpengaruh penting untuk eksistensi dana keuangan dalam perusahaan akan diproses melalui sistem informasi yang terdapat dalam sub unit yang berhubungan. Transaksi memiliki arti berbeda yaitu sebagai kejadian yang dimana pihak luar perusahaan yang melibatkan pertukaran diantara dua entitas atau lebih.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi adalah suatu kejadian yang memiliki pengaruh pada awal mula perusahaan dan juga pada setiap laporan keuangan.

b. Jurnal

Apabila transaksi sudah semakin banyak dan kompleks maka, cara seperti itu akan dapat menimbulkan kesulitan dan akan beresiko tinggi untuk terjadi kesalahan besar, maka untuk mengatasi masalah itu dibuatlah suatu tahapan pencatatan awal yang dapat mencatat transaksi dengan memisahkan debit dengan kredit yang dipengaruhi dengan kronologis berdasarkan tanggal transaksi yang disebut dengan jurnal (*journal*).

Menurut Mulyadi (2016:79) dalam bukunya yang berjudul sistem akuntansi sebagai berikut:

Jurnal merupakan data yang berisi tentang Akuntansi didalamnya memuat sebuah proses untuk pertama diselenggarakan di dalam Akuntansi, jurnal dirancang dengan baik dan sedemikian rupa sehingga tidak terjadinya suatu transaksi pada catatan, didalam catatan tersebut berisi data yang harus lengkap dan memiliki tanggal yang jelas sehingga data yang lainnya didalam catatan tersebut mudah dicari kembali dari dokumen dan sumbernya berasal.

c. Buku besar

Menurut Mulyadi (2016:95) buku besar didefinisikan buku besar (*General Ledger*) adalah buku berisi tumpukan akun yang dipergunakan dalam menyortasi serta meringkas sebuah informasi data dari catatan didalam jurnal.

d. Buku besar pembantu

Buku besar pembantu memberikan perluasan yang lebih lanjut tentang akun yang didata dalamnya sebagai catatan yang berisi Akuntansi terakhir dikarenakan data dicatat didalam sebuah dokumen berisi sumber atau ringkasan dan diklasifikasikan, yang dimana dibukukan dalam buku pembantu tidak terjadinya proses pencatatan Akuntansi untuk memberikan hasil laporan keuangan.

Menurut Sinaga (2016:57) ada 7 buku pembantu (*subsidiary ledgers*) sebagai berikut:

- 1) Buku pembantu biaya administrasi dan umum
 - 2) Buku pembantu biaya overhead pabrik
 - 3) Buku pembantu biaya penjualan
 - 4) Buku pembantu mesin dan alat
 - 5) Buku pembantu persediaan bahan baku dan penolong
 - 6) Buku pembantu utang
 - 7) Buku pembantu piutang
- e. Neraca saldo sebelum penyesuaian

Neraca saldo sebelum penyesuaian merupakan terdapatnya sebuah siklus Akuntansi yang dimana tahapan tersebut tidak dapat dibiarkan/diabaikan yaitu pos data pengumpulan saldo akhir berasal pada setiap akun dan buku besar yang tahapannya dinamakan neraca saldo.

Menurut Sinaga (2016:73) Neraca saldo adalah data didalam buku yang berisi nilai-nilai atau angka-angka dari beberapa kumpulan data saldo didapat pada setiap rekening dan pihak yang terkait didalamnya.

f. Ayat jurnal penyesuaian

Setelah penyusunan neraca saldo yang merupakan rangkuman dari seluruh saldo-saldo dari buku besar yang ada, maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan, jika dari neraca saldo langsung disusun laporan keuangan maka nilai perengkapan ini tidak menunjukkan angka yang sesungguhnya, untuk mengatasi hal ini dibuatlah suatu jurnal yang dinamakan ayat jurnal penyesuaian (*adjustment entry*).

Menurut Sinaga (2016:84) mendefinisikan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

“Jurnal penyesuaian merupakan jurnal dibuat pada periode akhir yang berfungsi untuk memperlihatkan akun atau menunjukkan akun bagaimana keadaan yang sebenarnya setelah transaksi dari periode tertentu.”

g. Neraca saldo setelah penyesuaian dan Neraca Lajur

Pada tahap ini, neraca saldo dengan saldo terakhir merupakan tanggal pencatatan, yang tidak dilakukan penyesuaian terhadap beberapa hal yang diperlukan dalam penyesuaian dan dilakukan pembuatan neraca saldo kembali.

Menurut Sinaga (2016:77):

Setelah melakukan pencatatan ayat jurnal neraca saldo yang berikutnya adalah penyesuaian yang dimana munculnya data saldo yang menjadi dasar utama dalam melakukan pembuatan laporan keuangan, saldo yang dimiliki dalam neraca harus disuaikan terlebih dahulu dan akan muncul dalam laporan keuangan perusahaan.

Setelah kita dapat membuat jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah memposting ke masing-masing perkiraan buku besar. Untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan maka disusunlah neraca lajur.

Menurut Sinaga (2016:91) “Neraca lajur merupakan kertas kerja atau (*worksheet*) yang dimana berisi data-data Akuntansi yang dipergunakan dalam membuat sebuah laporan keuangan.”

Neraca memiliki tujuan yang berupa penyusunan yang dimana untuk mengetahui berapa jumlah penyusunan yang merangkup data didalam neraca saldo dan melakukan penyesuaian, serta mempermudah dalam menemukan permasalahan yang dilakukan dalam pembuatan jurnal yang bersangkutan.

h. Penyusunan laporan keuangan

Di dalam mengambil sebuah keputusan yang rasional, adalah pihak dari ektern diperusahaan maupun didalam perusahaan sebaiknya menggunakan sebuah alat yang bisa menganalisa laporan keuangan yang diberikan oleh sebuah perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Abakin (2010:93) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Produk utama dari aktivitas akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan, dan didalam penyusunan wajib mengikuti standar yang berlaku sehingga benar-benar dapat melihat kondisi keuangan.

Laporan keuangan terdiri dari lima laporan dasar, yaitu:

- 1.) Laporan Laba Rugi, laporan keuangan yang berisi tentang keuntungan dari sebuah pendapatan, dan memiliki beban serta laba/rugi yang diperoleh didalam sebuah perusahaan pada setiap periode.
- 2.) Laporan Ekuitas, laporan yang menunjukkan penambahan serta pengurangan modal kekayaan perusahaan dalam periode tertentu.

- 3.) Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang memberikan petunjuk bagaimana keadaan suatu nilai aset liabilitas, serta ekuitas pada setiap periodenya.
- 4.) Laporan Arus Kas, Adalah laporan yang bertujuan untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan
- 5.) Catatan Atas Laporan Keuangan adalah data berupa info yang lebih rinci tentang sebuah laporan dari laba rugi, ekuitas, dan bagaimana posisi keuangan serta untuk mengetahui arus kas.

i. Jurnal Penutup

Jurnal Penutup adalah jurnal yang dimana memiliki tujuannya untuk memudahkan perkiraan sementara (perkiraan nominal) ke perkiraan modal serta laba ditahan (*retarimed earning*) untuk suatu periode tertentu yang dibuat pada akhir periode tertentu.

Menurut Sinaga (2016:120) pembuatan jurnal penutup memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan penutupan semua perkiraan untuk sementara terhadap rekening-rekening atau akun yaitu:
 - a. Pendapatan
 - b. Beban
 - c. Modal Usaha
2. Menentukan seberapa besar laba atau rugi untuk setiap periode yang dilaporkan.
3. Melakukan pemisahan transaksi pendapatan dan juga biaya agar tidak tercampur dengan nominal pendapatan biaya tahunan berikutnya.
4. Menyajikan neraca setiap awal tahun berikutnya dan dilakukan penutupan buku.

5. Untuk memudahkan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemisahan transaksi pada setiap periode sebelumnya dan pemeriksaan pada periode berikutnya.

j. Neraca saldo setelah penutup

Menurut Abakin (2010:103) neraca saldo setelah penutupan (*post closing trial balance*) adalah sebagai berikut:

Kumpulan saldo buku besar setelah dilakukannya penyesuaian posting jurnal dan pentupan jurnal, maka saldo-saldo buku besar perkiraan nominal akan menjadi nol. Sedangkan untuk perkiraan rill akan dijadikan sebagai saldo awal untuk tahun buku berikutnya.

k. Jurnal koreksi

Menurut abakin (2010:145) mengatakan bahwa dalam proses kerja akuntansi sering terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut kemungkinan disebabkan oleh ketidaktelitian petugas akuntansi dalam perusahaan yang bersangkutan. Setiap kesalahan yang terjadi harus segera diperbaiki, untuk memperbaikinya (mengkoreksi) harus diperlihatkan kapan kesalahan ditemukan, apakah ditemukan pada bulan yang sama atau pada tahun bulan berikutnya.

2.1.6 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa adalah

Desa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki kesatuan yang terikat dengan hukum dan dibatasi oleh wilayah yang berwenang sehingga harus mengikuti aturan untuk mengurus urusan pemerintahan dan tatanan desa. Masyarakat memiliki kepentingan yang berdasarkan atas prakarsa yang dimana telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Menurut Bintarto (1997) memberikan definisi (dalam buku Indra Bastian yang berjudul Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa 2015:6)

Desa adalah hasil yang dinampakan oleh keadaan geografis yang dimunculkan oleh unsur fisiografis sosial, faktor ekonomi, politik dan adat yang dimana kultur berpengaruh untuk adanya timbal balik antara satu desa dengan desa lainnya.

Menurut Hoesada (2014) memberikan definisi (dalam buku Yuliansyah dan Rusmianto yang berjudul Akuntansi Desa 2016:2)

Desa dan adat memiliki tugas yang hampir sama yang membedakannya adalah terlaksananya hak dan asul-usul, yang dimana bersangkutan melakukan pelaksanaan dan pengaturan dalam pemerintahan yang didasarkan dari penyusunan asli, desa dalam peraturan pengurusan serta adat, menjaga nilai-nilai sosial dan budaya. Penyesuaian terkait dengan adanya sengkata harus berdasarkan hukum adat yang telah ditetapkan pada setiap desa dalam wilayah pemerintahan dengan berpegang pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan didampingi dengan adanya musyawarah.

Menurut Indrizal (2016) memberikan definisi (dalam buku Sujarweni yang berjudul Akuntansi Desa 2015:1)

Desa dalam pengertian umum merupakan keadaan suatu wilayah dengan gejala yang bersifat universal yang dimana terdapat hingga belahan dunia manapun dan sebagai bagian dari kelompok kecil yang saling terhubung dengan masyarakat lokal yang bertempat tinggal yang terutama bergantung pada sektor pertanian.

2.1.7 Pemerintah Desa

Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yang didalamnya berisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimana Pemerintahn desa diartikan yaitu:

Pemerintahan Desa adalah tempat terjadinya penyelenggaraan yang didalamnya berisi kepentingan masyarakat dalam tatanan pemerintahan. Pemerintahan Desa berfungsi sebagai atasan yang membawahi kepala desa dan dibantunya oleh perangkat desa sebagai terselenggaranya Pemerintahan Desa.

2.1.8 Akuntansi Pemerintahan Desa

Pada dasarnya Akuntansi pemerintah merupakan sistem Akuntansi didalam bidang keuangan negara (*Public Finance*) yang dimaksud adalah anggaran termasuk kepada efek ditimbulkan, yang dimana bersifat seketika dan bisa bersifat permanen dan memiliki tingkatan dan unit dari setiap pemerintahan transparansi serta bersifat akuntabilitas publik penggunaan dalam hal mencatat serta melaporkan kerja dari pemerintah (Dedi dalam Gimon, Tinangon, Affandi 2018:3).

(Sadeli dalam Gimon, Tinangon, Affandi 2018:3) Menyatakan bahwa Akuntansi dalam pemerintah desa merupakan lembaga yang termasuk kedalam *non profit* atau *Institusional Accounting*. Akuntansi dalam pemerintahan dilakukan pada saat pencatatan dan melakukan pelaporan pada setiap interaksi yang telah terjadi proses pelaksanaan pemerintahan.

Akuntansi desa merupakan suatu proses pencatatan serta terjadinya transaksi dimana ruang lingkupnya berada pada desa yang dengan memaparkan hasil catatat atau nota setelah dibuatkan pencatatan dan laporan pada keuangan dapat menghasilkan sejumlah data berupa laporan keuangan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan desa.

Adapun dari pihak yang dapat mempergunakan informasi tentang keuangan desa berupa:

- a. Pemerintahan Pusat
- b. Pemerintahan Daerah
- c. Perangkat Desa
- d. Masyarakat Desa

Tujuan akuntansi dalam masyarakat desa, selain berguna disektor bisnis, akuntansi juga memiliki beberapa manfaat bagi investor, masyarakat, serta instansi pemerintah.

Kegiatan Akuntansi desa meliputi:

1. Mengidentifikasi serta untuk memberikan informasi yang berguna secara langsung dalam mengambil sebuah keputusan.
2. Memproses informasi dalam suatu pengambilan keputusan yang bersangkutan serta melakukan pelaporan yang diberikan
3. Mengkomunikasikan kembali informasi kepada pengguna laporan.

2.1.9 Tahapan Siklus Akuntansi Desa

Dikutip dari (IAI-KASP 2015:12-13) tahapan siklus Akuntansi Desa yaitu:

1. Tahap Pencatatan

Tahapan ini merupakan yang dilakukan dalam ini adalah langkah awal untuk menghasilkan bukti terjadinya transaksi dan selanjutnya tahap pencatatan yang dimasukan kedalam buku-buku yang sudah ditentukan.

2. Tahap Penggolongan

Tahap berikut ini adalah melakukan pencatatan yang didasarkan adanya bukti transaksi, dimana tahap penggolongan adalah tahap pengelompokan dari catatan ke bukti transaksi yang termasuk kedalam buku yang sudah disesuaikan dan digolongkan dengan nama-nama akun serta saldo yang telah tercatat didalamnya pengelompokan berupa debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran yang dimana melakukan neraca saldo serta kertas kerja. Setiap desa memiliki laporan berupa kekayaan yang dimiliki desa yang berisi saldo akhir dana akun apabila sudah di data dan di catatat pada dalam buku utama dan buku besar pembantu. Data laporan kekayaan pada desa berfungsi sebagai alat pengukur ketepatan memberikan informasi akun kedalam Debit dan Kredit. Laporan yang dimiliki desa dalam anggaran debit dan juga kredit memiliki kesetaraan dan berimbang dan diperlukannya pengecekan saldo dalam waktu ke waktu agar terhindar dari salah pencatatan. Dengan dilakukan pembuktian merupakan salah satu cara untuk meyakinkan bahwa pencatatan sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat.

4. Tahap Pelaporan

Tahap Pelaporan adalah bagian terakhir siklus Akuntansi dimana terbedi menjadi 2 tahap yaitu:

a. Membuat Laporan yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban yang terealisasi didalam pelaksanaan APBDesa. Yang dimana dalam laporan berisikan tentang informasi dana anggaran yang terealisasi yang bersumber dari pendatan belanja desa. Pembiayaan berasal dari pihak Pemerintah Desa yang berhubungan pada tahun anggaran yang lainnya.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini berisi tentang aset yang dimiliki berupa aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban serta ekuitas pemerintah pada setiap desa per tanggal 31 desember dan tahun tertentu.

2.1.10 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:81) mendefinisikan Keuangan desa sebagai berikut:

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban untuk melaksanakan suatu penyelenggaraan pada setiap desa yang dinilai dengan uang yang berbentuk suatu kekayaan dan saling berhubungan kepada hak dan kewajiban pada setiap desa.

Keuangan dan dana yang berasal dari pendapatan asli desa itu sendiri, APBD serta diselenggarakan urusan pemerintahan desa dan mejadi kewenangan desa dibiayai oleh dana anggaran pendapatan desa serta belanja desa, dan adanya bantuan dalam penyelenggaraan dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:

Keuangan Desa memiliki haknya dan kewajibannya pada setiap desa dimana suatu desa dilihat dari uang serta segala yang berkaitan dengan uang serta barang sebagai penunjang terlaksananya hak nya dan kewajibannya pada setiap desa. Yang dicantumkan Pada Ayat (2) yang berbunyi dan menyatakan apabila terdapatnya hak dan kewajiban serta adanya sebuah pendapat, belanja desa sehingga terjadinya proses Keuangan Desa.

Pada saat yang bersamaan pemerintahan desa diwajibkan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan terus terang atau transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin. Yang dimaksud dengan transparan adalah dikelola secara terbuka, berterus terang, dan akuntabel mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban yang sudah sudah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, serta partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan. Keuangan yang telah dilakukan pengelolaan selama masa 1 tahun dimulai dari tanggal 1 januari hingga dengan pertanggal 31 Desember

Tahun tertentu. Dana desa dan keuangan desa wajib serta harus melakukan pembukuan dalam sistematika yang sangat baik serta memenuhi dalam kaidah Akuntansi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa

Pengelolaan dana atau keuangan pada sebuah desa merupakan sebuah aktivitas yang berupa melakukan perancangan, melaksanakan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir adalah pertanggungjawaban dana desa tersebut. Dalam hal keuangan desa adanya siklus yang sangat terpadu dan sangat terintegrasi dengan satu tahap dan tahapan yang lainnya.

Pengelolaan dana desa serta keuangan desa memiliki 5 pengelolaan dimana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a) Rancangan Peraturan Desa dalam APBDesa disusun dan diserahkan kemudian di informasikan kepada kepala desa dan di bahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar disetujui hingga pada bulan Oktober.
- b) Rancangan peraturan yang dibuat serta disepakati dan memberikan informasi Kepala Desa kepada Bupati/Wakikota melalui camat.
- c) Bupati/Walikota yang dimana melaksanakan evaluasi paling lama adalah 20 hari kerja untuk melakukan Rancangan Peraturan Desa membahas

APBDesa yang diterima. Dan masa kerja 20 hari Bupati/Walikota bisa melaksanakan evaluasi dalam peraturan desa berlaku.

d) Apabila terjadi koreksi maka hasil dari evaluasi harus dilakukan oleh kepala desa dan melakukan perbaikan selama 7 hari kerja sejak disahkannya hasil evaluasi.

e) Hasil evaluasi langsung dilakukan tindakan oleh Kepala Desa maka sebab itu Bupati/Walikota berhak untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut. Yang telah dibatalkannya Peraturan Desa tersebut dan menyatakan disahkannya kepada APBDesa dengan adanya anggaran sebelumnya. Kepala Desa dapat melaksanakan tindakan pengeluaran dana operasional dari sistem penyelenggaraan didalam Pemerintah Desa.

f) Dalam hal ini Kepala Desa dapat melakukan pemberhentian pelaksanaan yang desa lakukan adalah berupa Peraturan Desa yang ditentukan paling lama dalam 7 hari sistem kerja dan melakukan penolakan yang diaman selanjutnya adalah Kepala Desa didampingi dengan BPD dapat membatalkan peraturan desa yang dimaksud.

2. Pelaksanaan

a) Semua penerimaan dan pengeluaran pada setiap pelaksanaan serta kewenangan desa dilihat dari rekening kas desa.

- b) Penerimaan dan pengeluaran desa harus memiliki pertanggungjawaban serta adanya bukti yang kongkret serta sah.
- c) Pemerintah desa tidak diberikan hak untuk melakukan pemungutan yang bertindak sebagai penerima dan apabila sudah ditetapkan didalam peraturan desa.
- d) Bendahara berhak untuk menyimpan uang yang berada dalam kas dan dalam jumlah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dipemerintahan desa.
- e) Pengeluaran yang desa lakukan memberikan dampak beban kepada APBDdesa yang dimana sebelum ditetapkannya rancangan menjadi peraturan desa.
- f) Pengeluaran desa yang dimana melakukan pembelanjaan serta pegawai memiliki ikatan serta operasional dilingkungan perkantoran dan sudah ditetapkan didalam peraturan Kepala Desa yang telah dikeluarkan meski telah adanya merancang peraturan desa dimana belum ditetapkan oleh APBDesa.
- g) Pelaksana kegiatan mengajukan yang memiliki tujuan berupa melakukan pelaksanaan untuk kegiatan yang harus didampingi dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dan pada RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretarias Desa dimana disahkannya oleh Kepala Desa.

h) Pelaksana didalam kegiatan memiliki tanggun jawaab terhadap perilaku atau tindakan yang dapat membuat atau menyebabkan pengeluaran beban anggaran belanja. Buku Pembantu Kas Kegiatan memiliki pertanggungjawaban didalam pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

a) Bendara desa wajib memiliki tugas yang berupa mencatat setiap penerimaan dan juga pengeluaran. Setelah itu tugas berikutnya adalah melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulan secara rapi dan baik. Data yang tersimpan dari penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui buku kas umum, kas pembantu pajak dan buku bank.

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum dipergunakan untuk mencatat kegiatan yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas, dilakukan secara tunai atau secara kredit dan juga dipergunakan untuk mencatat data mutasi perbankan dan mengecek kembali kesalahan didalam pembukuan. Buku kas umum memiliki fungsi yang berupa sebagai dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pajak yang berfungsi sebagai pembantu buku kas umum, dimana sebagai data didalam penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku Bank adalah buku yang berfungsi untuk memberikan info serta membantu buku kas umum untuk mendata penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan uang bank.

b) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

1) Kepala desa memberikan laporan tentang realisasi pelaksanaan APBDesa yang diamanatkan untuk Bupati/Walikota yang berupa :

a) Laporan pada semester pertama yaitu laporan tentang realisasi pelaksanaan APBDesa Semester Pertama. Diberikan waktu pada akhir bulan dan juli tahun berjalan.

b) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir. Disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2) Memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) pada setiap akhir tahun dan anggaran diketahui oleh Bupati/Walikota.

3) Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan masa akhir jabatan kepada Bupati Walikota.

4) Penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah bersifat tertulis dan diberikan kepada BPD pada setiap akhir anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa memberikan amanat kepada Bupati/Walikota untuk melakukan 3 pokok utama yang dilakukan pada akhir anggaran yaitu:

a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan:

1) Laporan pertanggungjawaban dan realisasi tidak dapat dipisahkan dari LPPD.

2) Memberikan informasi untuk masyarakat baik dilakukan tertulis atau melalui media serta memberikan informasi mudah diterima masyarakat.

3) Diberikan kepada Bupati/Walikota dan melalui camat.

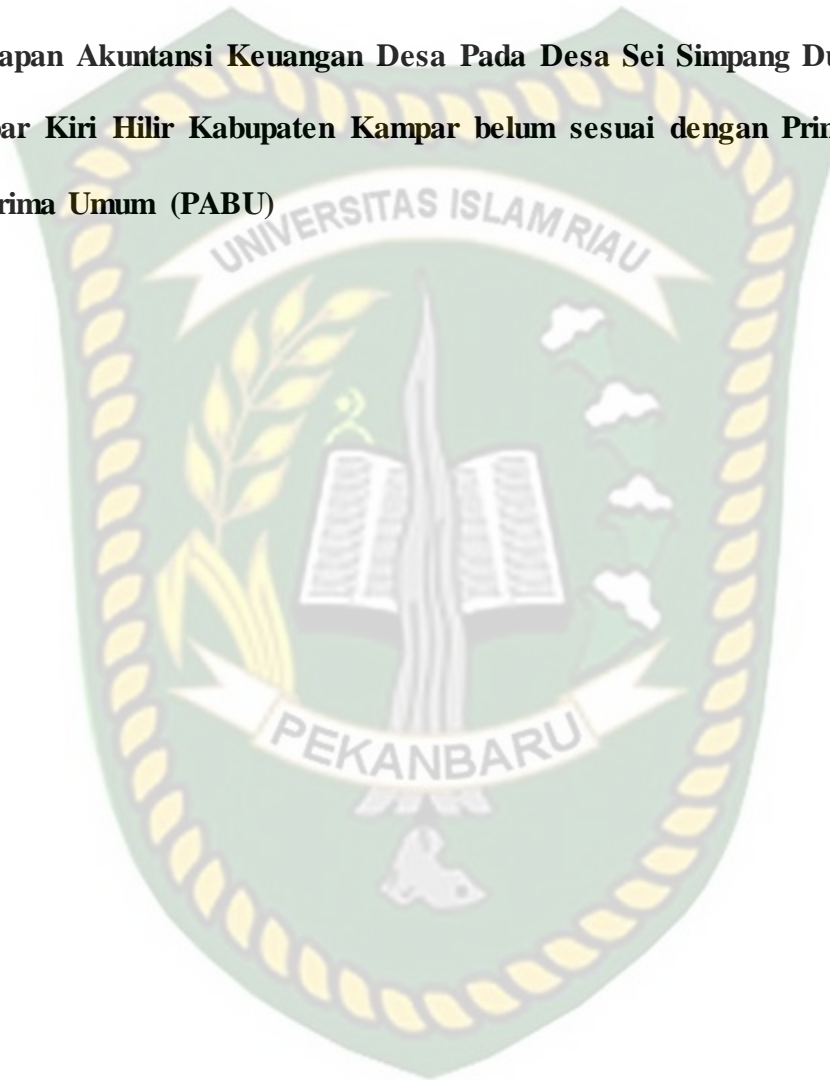
b) Wajib melaporkan Kekayaan Milik Desa setiap tanggal 31 Desember.

c) Melaporkan program pemerintahan serta pemerintahan daerah disaat saat masuk kedesa.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah serta telaah pustaka yang sudah dijelaskan diatas maka dapat penulis bisa mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, serta hipotesis yang ditetapkan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan yang menjadi objek dari penelitian ini ialah Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2019:228) data primer bersumber langsung dari pengumpulan data yang didapat dari sumber-sumber berupa hasil dengan cara wawancara langsung kepada bendahara desa mengenai proses penyusunan keuangan desa. Data yang diperoleh seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Laporan Kekayaan Desa dan juga Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2019:228) Data sekunder merupakan data yang bersumber secara tidak langsung dan memberikan kepada pengumpulan data. Sumber data tersebut diperoleh dari *literature* serta artikel yang berkenaan dengan penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis merupakan wawancara serta dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan pihak yang mengetahui tentang sejarah desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu memperoleh data langsung dari tempat kejadian dan mengumpulkan data-data dalam bentuk pengambilan gambar serta dokumen-dokumen resmi milik desa tersebut. Dokumen resmi milik desa tersebut meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak serta Dokumen penting lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data yang didapat dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan keterangan yang utuh dan lengkap serta permasalahan yang dihadapi dan memperoleh sebuah kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Sei Simpang Dua

Desa Sungai Simpang Dua adalah nama sebuah kawasan yang berada di kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Dari beberapa tokoh Masyarakat Desa Sungai Simpang Dua di kenal dengan adanya sumber mata air yang berbentuk seperti sumur. Mendengar dari cerita tokoh masyarakat sekitar desa bahwa sumber mata air di desa tersebut tidak pernah kering walaupun pada saat musim kemarau, dan tokoh masyarakat mengatakan bahwa sumur tersebut terhubung dengan sungai kecil yang berada dibawah tanah dan apabila musim hujan air akan cepat meresap kedalam sungai kecil tersebut.

Dan konon wilayah Desa Sei Simpang dua tersebut memiliki cerita mistis oleh sebagian orang-orang yang berada pada desa tersebut. Desa Sei Simpang Dua dianggap oleh sebagian orang untuk keperluan seperti ritual kepercayaan tertentu contohnya adalah agar diberi petunjuk siapa yang akan menjadi calon Bupati atau walikota dan Kepala Desa dan dipergunakan untuk pengobatan, nomor undian berhadiah.

Desa Simping Dua awal mulanya dibentuk sekitaran pada tahun 1992 dan melalui program Pemerintah Transmigrasi sosial dari daerah asal yang berjumlah sekitar 478 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dari departemen Sosial yaitu Bapak Sukarman dan tahun 1997 desa yang dikelola diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Riau. Tanah pada Desa Sei Simping Dua merupakan tanah yang berasal dari penyerahan dari Pemda Kabupaten Kampar dan pada saat kepemimpinan Pemerintah Kepala Desa yang pertama dalam kegiatan Desa. Desa Sungai Simping Dua dipergunakan dalam menata sebuah kelembagaan yang dimana Kelompok Masyarakat masih bersifat sederhana dalam pembangunan.

Desa Sei Simping Dua pernah dipimpin oleh :

- a. Teguh Iriyanto HW mulai tahun 1997 sampai 1999
- b. A. Rohim mulai tahun 1999 sampai 2007
- c. Teguh Iriyanto HW mulai tahun 2007 sampai 2013
- d. Solihin mulai tahun 2013 sampai 2019
- e. Rio Ari Kusuma mulai tahun 2019 sampai sekarang

4.1.2 Visi dan Misi Desa Sei Simpang Dua

4.1.2.1 Visi Desa Sei Simpang Dua

Adapun visi desa Sei Simpang Dua yaitu terwujudnya desa sungai simpang dua yang transparan dengan masyarakat yang sejahtera tanpa hambatan. Visi Desa Sei Simpang Dua adalah melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan di Desa yang dilakukan baik secara individu, kelompok masyarakat, serta secara kelembagaan dan untuk enam tahun kedepannya desa Sei Simpang Dua mengalami perubahan agar lebih baik. Dengan majunya desa masyarakat dipedesaan akan mendapat kesejahteraan yang didasari semangat membangun desa dan memiliki rasa kebersamaan untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Desa.

4.1.2.2 Misi Desa Sei Simpang Dua

Adapun misi Desa Sei Simpang Dua yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat Desa terutama pada proses pemerintahan pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan pembangunan.
2. Menggali dan mempererat partisipasi, kemandirian dan keswadayaan masyarakat Desa dalam seluruh siklus proses pembangunan dan pembangunan Desa.
3. Meningkatkan kapasitas dan memberdayakan kelompok-kelompok terutama kelompok pemuda.

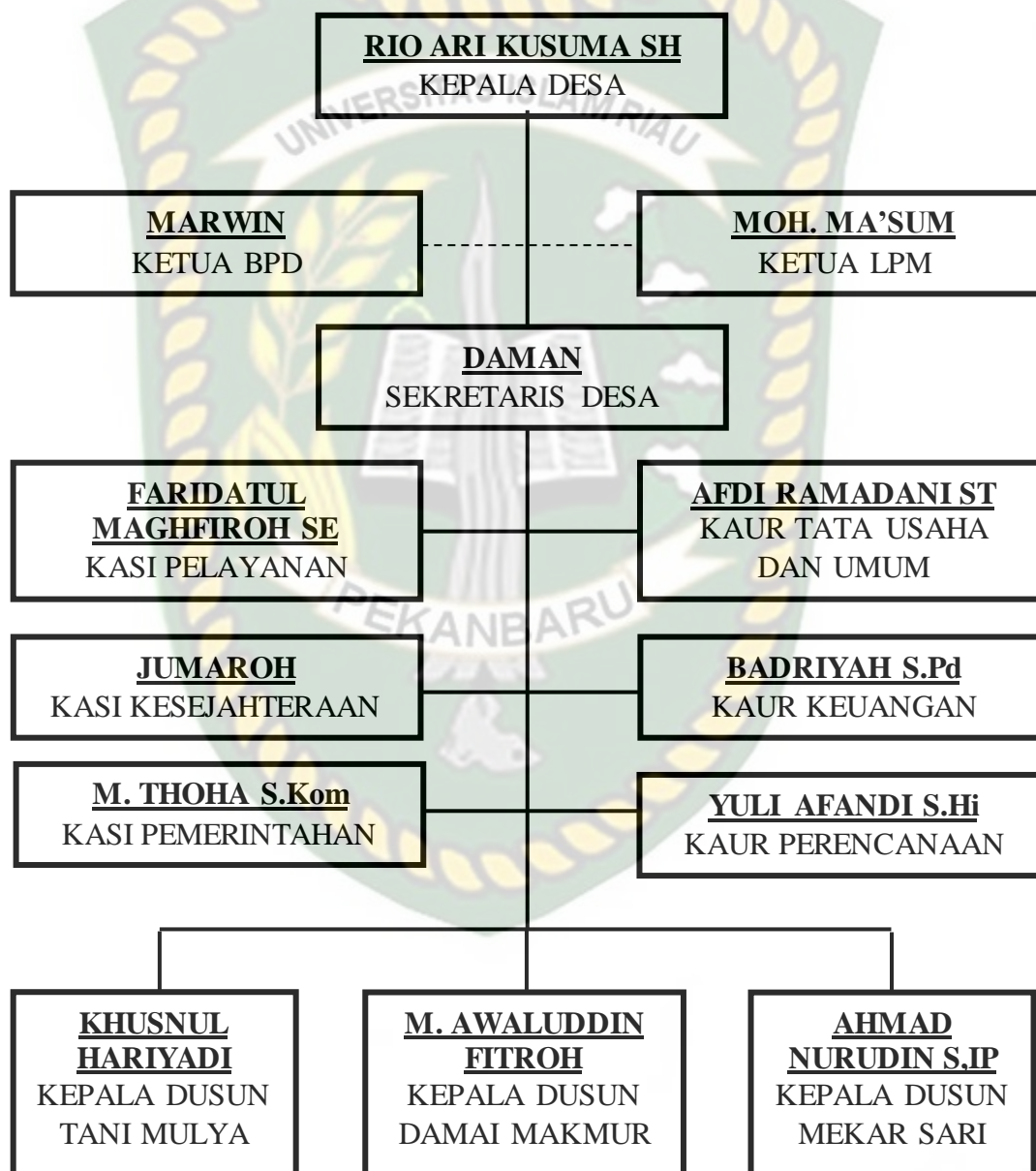
4. Memperkuat transparansi dalam akuntabilitas, pengelolaan administrasi dan keuangan Desa.



4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Sumpang Dua

GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Sumpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar



4.1.4 Geografis Desa Sei Simpang Dua

Desa Sei Simpang Dua terletak di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang mempunyai luas wilayah pemukiman 32 Ha, Perkantoran 5 Ha, Sekolah 5 Ha, Jalan 20 km, serta lapangan sepak bola 1,75 Ha dengan jumlah 603 KK. Jarak antara Desa ke ibu kota kecamatan terdekat 7 km, dengan ibu kota kabupaten 100 km.

Batas-batas wilayah Desa Sei Simpang Dua sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hanguah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pagar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sialang Kubang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Pagar

4.1.5 Demografis Desa Sei Simpang Dua

Desa Sei Simpang Dua memiliki jumlah penduduk berupa 1.982 jiwa yang terdiri dari 1021 jiwa laki-laki dan 961 jiwa perempuan yang terdiri dari 603 Kepala Keluarga dengan rincian tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sei Simpang Dua
Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Jenis Kelamin	Total	Persentase
1	Laki-laki	1021	51,51%
2	Perempuan	961	48,48%
	Total	1982	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sei Simpang Dua

4.1.5 Ekonomi Desa Sei Simpang Dua

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sei Simpang Dua didominasi oleh lahan pertanian, hal ini terlihat dari penggunaan tanah di Desa Sei Simpang Dua sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan seperti jagung seluas 7 Ha, Palawijaya seluas 1 Ha, Kakao/coklat seluas 16 Ha, sawit seluas 954 Ha, karet seluas 0,5 Ha, kelapa seluas 2 Ha serta singkong seluas 1 Ha. Berikut mata pencaharian penduduk pada Desa Sei Simpang Dua.

TABEL 4.2
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Sei Simpang Dua
Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Mata Pencaharian	Total	Persentase
1	Petani	1239 orang	73,4%
2	Pedagang	167 orang	10%
3	PNS	16 orang	1%
4	Tukang	10 orang	0,6%

5	Guru	37 orang	2,1%
6	Bidan/Perawat	2 orang	0,1%
7	Dokter Swasta	1 orang	0,05%
8	TNI/POLRI	3 orang	0,17%
9	Supir/angkutan	20 orang	1,18%
10	Buruh	120 orang	7,1%
11	Jasa Persewaan	2 orang	0,1%
12	Swasta	71 orang	4,20%
Total		1.688 Orang	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sei Simpang Dua

4.1.6 Pendidikan Desa Sei Simpang Dua

Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir memiliki sarana pendidikan seperti PAUD, TK, Sekolah Dasar, SLTP, MDA serta TPA. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan seperti berikut:

TABEL 4.3
Klasifikasi Sarana Pendidikan Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

NO	Sarana Pendidikan	Total
1	PAUD	1 buah
2	Taman Kanak-kanak	1 buah
3	Sekolah Dasar	2 buah
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 buah
5	Taman Pendidikan Anak (TPA)	1 buah

6	Madrasah Diniyah Awaliyah	1 buah
Total		7 buah

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sei Simpang Dua

Berdasarkan tabel diatas bahwa didesa Sei Simpang Dua memiliki sarana pendidikan hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan pada tingkatan SMA dan Perguruan tinggi belum ada. Tabel dibawah ini menunjukkan tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Sei Simpang Dua.

Tabel 4.4
Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Sei Simpnag Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Tingkatan Pendidikan	Total	Persentase
1	SD/MI	436 orang	37,1%
2	SLTP/MTS	473 orang	40,2%
3	SLTA/MA	225 orang	19,1%
4	SI/DIPLOMA	15 orang	1,3%
5	Putus Sekolah	10 orang	0,9%
6	Buta Huruf	16 orang	1,4%
Total		1.175 orang	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sei Simpang Dua

4.1.7 Agama Desa Sei Simpang Dua

Agama dalam diri manusia sangat berperan penting, jika agama tidak ditegakan dalam diri manusia maka hidup manusia seperti tidak adanya pedoman sehingga mudah terjerumus dalam berperilaku buruk dan merugikan orang lain. Sebagian besar

Penduduk desa Sei Simpang Dua beragama islam. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL 4.5
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Pemeluk Agama	Total	Persentase
1	Islam	1916 orang	98,8%
2	Hindu	0	0
3	Budha	0	0
4	Kristen	24 orang	1,2%
5	Kristen Katolik	0	0
Total		1940 orang	100%

Sumber data: Kantor Desa Sei Simpang Dua

Berikut sarana ibadah Desa Sei Simpang Dua dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL 4.6
Klasifikasi Sarana Ibadah Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Sarana Ibadah	Total
1	Masjid	1 buah
2	Musholla	16 buah
Total		17 buah

Sumber data: Kantor Desa Sei Simpang Dua

4.2 Hasil Penelitian dan Hasil Pembahasan

Akuntansi keuangan desa sangat penting dalam menjalankan dan mengelola keuangan desa, yang dimana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penggunaan Akuntansi Desa untuk mengelola keuangan desa secara baik, transparan dan terarah. Berdasarkan dari permasalahan yang jabarkan pada BAB I dan berdasarkan pada pedoman-pedoman yang teoritis dan relevan yang telah dipaparkan pada BAB II, maka pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan yang telah diterapkan oleh Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Desa Sei Simpang Dua menggunakan sistem pencatatan *single entry* atau juga disebut dengan tata buku tunggal, yang artinya pencatatan transaksi keuangan hanya dilakukan satu kali. Kas yang bertambah dicatat pada kolom penerimaan sedangkan kas yang berkurang dicatat pada kolom pengeluaran. Keunggulan dari penggunaan *single entry* yaitu sederhana sehingga penggunaannya lebih mudah dan praktis. Metode ini hanya memiliki dua daftar yaitu penerimaan dan pengeluaran.

Desa Sei Simpang Dua menggunakan dasar pengakuan akuntansi *cash basic* yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan hanya pada saat kas mengalami perubahan baik penerimaan maupun pengeluaran kas. Penerimaan kas diakui apabila kas sudah benar-benar diterima dan pengeluaran kas diakui apabila sudah melakukan pembayaran secara kas.

4.2.2 Proses Akuntansi

Desa Sei Simpang Dua telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam menyusun laporan keuangan. Dalam penggunaan aplikasi tersebut transaksi-transaksi yang telah terjadi di masukkan berdasarkan bukti-bukti yang ada seperti dokumen, nota-nota serta faktur. Transaksi tersebut dapat terjadi karena telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penerimaan kas dan pengeluaran kas yang bersifat tunai dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang melalui bank/transfer dicatat pada Buku Bank. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP 2015), tahapan proses akuntansi meliputi:

1. Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan Desa Sei Simpang Dua dimulai dengan bukti transaksi kemudian dicatat ke dalam buku kas umum-tunai, buku bank desa, buku kas pembantu pajak. Sumber pendapatan Desa Sei Simpang Dua diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD) serta pendapatan transfer berupa dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi serta bantuan keuangan Kabupaten/kota. Sedangkan untuk pengeluaran desa berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

A. Buku Kas Umum

Semua transaksi yang terkait penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja serta pembiayaan pada Desa Desa Sei Simpang Dua disajikan dalam buku kas umum, mencatat kas masuk disisi penerimaan dan mencatat kas keluar disisi pengeluaran. Berikut adalah Buku Kas Umum yang telah disusun oleh Desa Sei Simpang Dua.

TABEL 4.7
Buku Kas Umum – Tunai
Pemerintahan Desa Sei Simpang Dua
Tahun Anggaran 2019

Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26/12/2019	Tunai Kas dibendahara	136.607.000		136.607.000
26/12/2019	Penghasilan perangkat desa		64.800.000	71.807.000
26/12/2019	Tunjangan ketua dan anggota BPD		10.800.000	61.007.000
26/12/2019	Insetif RT/RW		17.250.000	78.257.000

Sumber : Buku Kas Umum Desa Sei Simpang Dua 2019 (Lampiran I)

B. Buku Bank Desa

Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan uang bank. Transaksi tersebut berupa penerimaan ADD, penerimaan dan batuan keuangan provinsi, pajak daerah, dan lain-lain. Berikut ini merupakan Buku Bank Desa pada Desa Sei Simpang Dua.

TABEL 4.8
Buku Bank Desa
Desa Sei Simpang Dua 2019

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/12/2019	Tunai	0010/ BANK /08.20 03/2019	0,00	0,00	30,310,00 0	0,00	0,00	56,190,25 0
2	23/12/2019	Tunai	0011/ BANK /08.20 03/2019	0,00	0,00	40,675,00 0	0,00	0,00	15,515,25 0
3	26/12/2019	Dana ADD TW IV	0017/ TBP/0 8.2003 /2019	123,391,750	0,00	0,00	0,00	0,00	137,907,0 00
4	26/12/2019	Tunai	0012/ BANK /08.20 03/2019	0,00	0,00	136,607,0 00	0,00	0,00	1,300,000
5	27/12/2019	Dana Pajak TW IV	0018/ TBP/0 8.2003 /2019	9,832,250	0,00	0,00	0,00	0,00	11,132,25 0

Sumber: Buku Bank Desa Sei Simpang Dua 2019 (Lampiran II)

C. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak. Berikut penyajian buku kas pembantu

pajak yang dibuat oleh Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

TABEL 4.9
Buku Kas Pembantu Pajak
Desa Sei Simpang Dua 2019

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan(Rp)	Penyetoran(Rp)	Saldo
1	23/12/2019	Potongan pajak PPh pasal 22	88.636		
2	23/12/2019	Potongan pajak PPh pasal 22	90.909		
3	23/12/2019	Potongan pajak PPh pasal 21	245.455		
4	23/12/2019	Potongan pajak Pph pasal 22		88.636	

Sumber: Data Desa Sei Simpang Dua (Lampiran III)

2. Tahap Penggolongan

Setelah tahap pencatatan dilakukan, tahap selanjutnya yaitu tahap penggolongan. Tahap penggolongan ini berisi buku besar dan buku pembantu yang memiliki fungsi untuk menggolongkan segala akun transaksi kedalam satu akun yang sama. Buku besar merupakan kumpulan akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah tercatat dalam jurnal.

Pada tahap ini, Desa Sei Simpang Dua tidak memposting akun yang ada kedalam buku besar, sehingga tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Akibat tidak membuatnya buku besar yaitu saldo masing-masing

akun tidak dihitung selama tahun berjalan sehingga Desa Sei Simpang Dua akan kesulitan dalam mengetahui saldo akhir dari transaksinya masing-masing serta akan kesulitan juga dalam penyusunan neraca. Berikut contoh format Buku Besar yang seharusnya dilakukan oleh Desa Sei Simpang Dua yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Buku Besar

Nama Akun: Kas

No.Akun:

Tanggal	Ket	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)
26/12/2019	Penerimaan Dana Desa Transfer		136,607,000		136,607,000	
26/12/2019	Pembayaran Penghasilan Perangkat Desa			64,800,000	71,807,000	
26/12/2019	Pembayaran Tunjangan ketua dan anggota BPD			10,800,000	61,007,000	
26/12/2019	Pembayaran Insentif RT/RW			17,250,000	43,757,000	

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.11
Buku Besar Pendapatan

Nama Akun: Pendapatan

No. Akun:

Tanggal	Ket	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)

26/12/2019	Penerimaan dana desa		136,607,000		136,607,000
------------	----------------------	--	-------------	--	-------------

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.12
Buku Besar Belanja

Nama Akun: Belanja Pegawai

No. Akun:

Tanggal	Ket	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)
26/12/2019	Pembayaran penghasilan perangkat desa		64,800,000		64,800,000	
26/12/2019	Pembayaran tunjangan ketua dan anggota BPD		10,800,000		10,800,000	
26/12/2019	Pembayaran insentif RT/RW		17,250,000		17,250,000	

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini melakukan pencatatan dari buku besar ke neraca saldo. Pencatatan neraca saldo digunakan untuk meyakinkan bahwa pencatatan sudah benar artinya pengecekan saldo debit dan kredit sudah seimbang agar mempermudah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa serta Laporan Kekayaan Desa.

Pada tahap ini Desa Sei Simpang Dua tidak menyusun neraca saldo sehingga tidak mengetahui dimana kekeliruan atau kesalahan dalam pencatatan atas saldo akun diawal sebelum disusunnya laporan keuangan. Sebaiknya Desa Sei Simpang Dua menyusun neraca saldo dan kertas kerja untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dalam mencatat saldo akun sebelum laporan keuangan disusun. Berikut contoh Neraca Saldo yang seharusnya dilakukan oleh Desa Sei Simpang Dua yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Neraca Saldo
Tahun Anggaran 2019

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1110	Kas Desa:		
1111	a. Kas di Bendahara Desa	4,639,818	
1112	b. Rekening Kas Desa	11,132,250	
1300	Aset Tetap:		
1310	a. Tanah		
1320	b. Peralatan dan Mesin	132,772,000	
1330	c. Gedung dan Bangunan	601,359,800	
4100	Pendapatan Asli Desa		
4110	Hasil Aset Desa		40,675,000
4200	Pendapatan Transfer		
4210	a. Dana Desa		752,045,000
4220	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		44,095,250
4230	c. Alokasi Dana Desa		489,567,000
4241	d. Bantuan Provinsi		200,000,000
4242	e. Bantuan Kabupaten/Kota		22,498,175
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:		
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	14,900,000	

b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238,400,000	
c. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	414,000	
d. Tunjangan BPD	43,200,000	

Sumber Data: Olahan Penulis 2021

Desa Sei Simpang Dua juga tidak melakukan penyesuaian atas persediaan dan aset tetap yang dimiliki oleh desa. Penyesuaian berfungsi untuk menyajikan nilai yang sebenarnya dari aset yang dimiliki desa pada akhir periode. Konsekuensi yang terjadi jika penyesuaian terhadap aset yang dimiliki desa tidak dibuat yaitu nilai aset dan ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih tinggi dari nilai yang seharusnya. Berikut ini beberapa transaksi yang perlu dibuat jurnal penyesuaian:

a) Bahan Habis Pakai

Bahan habis pakai merupakan aset yang digunakan untuk dipakai dalam aktivitas operasional yang entitasnya bersifat habis pakai yang dipakai satu kali ataupun diperiode jangka pendek. Bahan habis pakai adalah aset lancar yang dimiliki oleh desa dengan manfaat kurang dari satu tahun yang mana harus dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Salah satu bahan habis pakai yang perlu dilakukan penyesuaian yaitu Alat Tulis Kantor (ATK).

Desa Sei Simpang Dua tidak membuat penyesuaian terhadap persediaan Alat Tulis Kantor (ATK). Desa juga tidak menyajikan nilai persediaan diakhir periode, sehingga pada laporan kekayaan milik desa nilai persediaan sebesar Rp0. Nilai pembelian pada Alat Tulis Kantor (ATK) tahun 2019 sebesar Rp 5.846.700. Setelah

dikonfirmasi ke bendahara desa Sei Simpang Dua ternyata persediaan alat tulis kantor telah habis terpakai selama 1 tahun. Maka dari itu persediaan didalam laporan kekayaan milik desa bersaldo Rp0.

b) Aset Tetap

Menurut Carl S. Warren (2017:486) Aset tetap merupakan aset yang bersifat permanen yang dimana memiliki waktu dalam jangka panjang atau relatif yaitu berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, tanah serta jalan, jaringan dan instalasi. Aset tetap memiliki jangka waktu yaitu 12 (dua belas) bulan lebih untuk dipergunakan saat pelaksanaan pemerintahan atau digunakan untuk masyarakat umum. Nilai aset tetap kecuali tanah harus disusutkan setiap tahun karena aset tetap akan mengalami penurunan manfaat. Saat aset tetap dijual nilainya tidak akan sama saat awal pembelian aset tetap.

Aset tetap pada Desa Sei Simpang Dua berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi serta aset tetap lainnya. Desa Sei Simpang Dua tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap tersebut sehingga nilai aset tetap tidak menunjukkan nilai sebenarnya.

Tabel 4.14
Aset Tetap

No	Aset Tetap	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	Rp424,706,000	Rp132,772,000
2	Gedung dan Bangunan	Rp355,560,250	Rp601,359,800

3	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp71,479,600	Rp0
---	-------------------------------	--------------	-----

Perkiraan umur ekonomis untuk peralatan dan mesin yaitu 5 tahun, gedung dan bangunan yaitu 10 tahun sedangkan jalan, jaringan dan instalasi yaitu 20 tahun. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Dibawah ini merupakan bentuk penyesuaian aset tetap yang sebenarnya dilakukan Desa Sei Simpang Dua:

1. Peralatan dan Mesin

$$\text{Penyusutan /tahun 2018} = \text{Rp}424.706.000/5 = \text{Rp}84.941.200$$

Adjusment:

$$\text{Beban penyusutan peralatan dan mesin} \quad \text{Rp}84.941.200$$

$$\text{Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin} \quad \text{Rp}84.941.200$$

2. Gedung dan Bangunan

$$\text{Penyusutan /tahun 2018} = \text{Rp}335.560.250/10 = \text{Rp}33.556.025$$

Adjusment:

$$\text{Beban penyusutan gedung dan bangunan} \quad \text{Rp}33.556.025$$

$$\text{Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan} \quad \text{Rp}33.556.025$$

3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penyusutan /tahun 2018 = Rp71.479.699/20 = Rp3.573.980

Adjustment:

Beban Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp3.573.980

Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi Rp3.573.980

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dalam proses akuntansi. Tahap Pelaporan yang dibuat oleh Desa Sei Simpang Dua terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Laporan Kekayaan Milik Desa. Desa Sei Simpang Dua dalam menyusun laporan keuangan sudah menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes).

A. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyajikan informasi mengenai pendapatan dan belanja desa, pembiayaan, surplus/defisit serta SILPA tahun berjalan. Berikut laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapata dan belanja desa yang dibuat oleh Desa Sei Simpang Dua sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa.

Tabel 4.15
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Desa Sei Simpang Dua 2019

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40,675,000	40,675,000	0.00
4.1.2	Hasil Aset Desa	40,675,000	40,675,000	0.00
4.2.	Pendapatan Transfer	1,509,794,175	1,508,205,425	1,588,750
4.2.1.	Dana Desa	752,045,000	752,045,000	0.00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	45,684,000	44,095,250	1,588,750.00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	489,567,000	489,567,000	0.00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	200,000,000	200,000,000	0.00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	22,498,175	22,498,175	0.00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	30,310,000	30,310,000	0.00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	30,310,000	30,310,000	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,580,779,175	1,579,190,425	1,588,750
5	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	298,282,000	296,914,000	1,368,000
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Kunjungan Kepala Desa	14,900,000	14,900,000	0.00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Kunjungan Kepala Desa	238,400,000	238,400,000	0.00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,782,000	414,000	1,368,000
5.1.4.	Tunjangan BPD	43,200,000	43,200,000	0.00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	392,744,875	390,894,875	1,850,000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	119,726,700	118,716,700	1,010,000

5.2.2.	Belanja Jasa Honorium	202,730,000	202,730,000	0.00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	39,990,000	39,150,000	840,000
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	5,000,000	5,000,000	0.00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	1,800,000	1,800,000	0.00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	23,498,175	23,498,175	0.00
5.3.	Belanja Modal	749,717,800	734,131,800	15,586,000
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	132,772,000	132,772,000	0.00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	616,945,800	601,359,800	15,586,000
	JUMLAH BELANJA	1,440,744,675	1,421,940,675	18,804,000
	SURPLUS/(DEFISIT)	140,034,500	157,249,750	(17,215,250)
	PEMBIAYAAN NETTO	(140,034,500)	140,034,500	0.00

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Desa Sei Simpanng Dua Tahun 2019 (Lampiran IV)

B. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan informasi yang dimana laporan tersebut berisi kekayaan bersih milik desa dalam satu periode anggaran. Laporan kekayaan milik desa ini terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan kekayaan milik desa yang dibuat oleh Desa Sei Simpanng Dua masih terdapat kekeliruan, karena desa tidak menghitung sisa persediaan yang dimiliki. Selain itu aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 dan 2019 tidak diakumulasikan nilainya dilaporan kekayaan milik desa.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Sei Simpang Dua Pada tahun 2018 (Lampiran V) terdiri dari aset seperti Peralatan dan Mesin sebesar Rp424.706.000, Gedung serta Bangunan sebesar Rp355.560.250, dan Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp71.479.600. Aset tetap pada tahun 2018 tidak disajikan oleh Desa Sei Simpang Dua sebagai penambahan aset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019.

Tabel 4.16
Laporan Kekayaan Milik Desa
Desa Sei Simpang Dua
Sampai dengan 31 Desember 2019

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
I ASET		
A. Aset Lancar		
1. Kas dan Bank	15,772,068	14,815,100
a. Kas di Bendahara Desa	4,639,818	614,600
b. Rekening Kas Desa	11,132,250	14,200,500
2. Piutang	0,00	0,00
a. Piutang Sewa Tanah	0.00	0.00
b. Piutang Sewa Gedung	0.00	0.00
c. Piutang Sewa Peralatan	0.00	0.00
d. Piutang Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00
e. Piutang Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00
f. Piutang Alokasi Dana	0.00	0.00
g. Piutang Panjar Kegiatan	0.00	0.00
h. Piutang Lain-lain	0.00	0.00
3. Persediaan	0,00	0,00
a. Persediaan Benda Pos dan Materai	0.00	0.00
b. Persediaan Alat Tulis Kantor	0.00	0.00
c. Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	0.00	0.00
d. Persediaan Alat-alat Listrik/Lampu/Baterai	0.00	0.00

Jumlah Aset Lancar	15,772,068	14,815,100
B. Aset Tidak Lancat		
1. Investasi		
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa		22,344,300
2. Aset Tetap		
a. Tanah		
b. Peralatan dan Mesin	557,478,000	424,706,000
c. Gedung dan Bangunan	956,920,050	355,560,250
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi	71,479,600	
e. Aset Tetap Lainnya		
f. Kontruksi Dalam Pengerjaan		
g. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(210.761.585)	(120.497.225)
Jumlah Aset Tidak Lancar	1,375,116,065	682,113,325
JUMLAH ASET (A+B)	1,390,888,133	696,928,425
II KEWAJIBAN		
1. Kewajiban Jangka Pendek	0.00	0.00
2. Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban (1+2)	0.00	0.00
III. EKUITAS		
Ekuitas	1,375,116,065	682,113,325
Ekuitas SAL	15,772,068	14,815,100
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	1,390,888,133	696,928,425

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pada penelitian ini maka peneliti akan memberikan ringkasan secara menyeluruh melalui simpulan dan saran sehingga memberikan manfaat yang berguna untuk masa yang akan datang.

5.1 Simpulan

1. Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menyusun laporan keuangan desa. Dasar pencatatan yang digunakan oleh Desa Sei Simpang Dua adalah *Single Entry*. Dasar pengakuan yang digunakan oleh Desa Sei Simpang Dua yaitu *Cash Basic*.
2. Tahap Pencatatan yang dilakukan Desa Sei Simpang Dua dimulai dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak serta buku bank desa. Pada tahap pencatatan ini sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa, namun secara Prinsip Akuntansi Berlaku Umum belum sesuai.
3. Pada Tahap Penggolongan Desa Sei Simpang Dua tidak membuat buku besar sehingga belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi berlaku umum

4. Pada Tahap Pengikhtisaran Desa Sei Simpang Dua tidak membuat neraca saldo serta tidak melakukan penyesuaian terhadap aset tetap dan persediaan yang dimiliki oleh Desa Sei Simpang Dua
5. Pada Tahap Pelaporan Desa Sei Simpang Dua membuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa, namun pada Laporan Kekayaan desa, desa tidak membuat akumulasi penyusutan pada aset sehingga belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Pemerintahan Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Berterima Umum. (PABU), sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh desa menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Sebaiknya Desa Sei Simpang Dua pada tahap Penggolongan membuat buku besar dan pada tahap pengikhtisaran membuat neraca saldo. Sehingga saat melakukan pengelolaan keuangan desa dapat berdampak baik dan tidak terdapat kekeliruan dalam mengerjakan laporan keuangan desa.

3. Pemerintahan Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebaiknya menyajikan nilai aset tetap yang diperoleh tahun sebelumnya terhadap periode berjalan serta membuat akumulasi penyusutan pada aset tetap yang dimiliki Desa tersebut.
4. Pemerintahan Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebaiknya menghitung jumlah persediaan. Perhitungan tersebut harus dihitung untuk mengetahui secara detail dan rinci mengenai ketersediaan persediaan dan menunjukkan nilai yang sebenarnya pada laporan kekayaan milik desa



DAFTAR PUSTAKA

- Abakin. 2010. *Pengantar Akuntansi Konsep Dasar Teori Dan Praktek Untuk Usaha Jasa Dan Dagang*. Pekanbaru:Riawsarana
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Gimon, Jantje J. Tinangon, Dhullo Affandi. 2018. "Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDesa Pada Pemerrintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu". *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol 13, No 2, hal: 1-10.
- Halim, Abdul., dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Harrison, Walter. T. Jr, Charles T. Horngren, C. William Thomas, Themin Suwardy. 2012. *Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard-IFRS*. Jakarta: Erlangga
- Mardi. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi Edisi Empat*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sinaga, Yayah. 2016. *Dasar Pencatatan, Buku Besar, Neraca Saldo, Ayat Jurnal Penyesuaian, Neraca Jalur, Laporan Keuangan, Jurnal Pentutup, DLL*. Jakarta: Langit Publisher.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Pustaka Baru Press
- Warren, Carl S, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersya Tri Wahyuni, Amir Abadi Jusuf. 2017. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP : *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

